

LAPORAN RENJA (RENCANA KERJA) TAHUN 2023



**DINAS PANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Pangan merupakan prasyarat utama dalam membangun dan menciptakan sumberdaya yang handal dan berkualitas. Kompleksnya persoalan pangan ditingkat wilayah harus diatasi dengan perencanaan yang komprehensif dan simultan serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang begitu kompleks disektor pangan dan pada sisi lain merupakan upaya untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 menuju Sulawesi Tengah yang maju mandiri dan berdaya saing. Renja Dinas Pangan Tahun 2023 juga merupakan acuan dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dibidang ketahanan pangan.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2023 telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 serta Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI sehingga muatan Renja akan secara signifikan membantu tercapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan.

Disadari bahwa materi dan teknik penyusunan yang disajikan dalam Rencana Kerja ini cakupannya belum maksimal, serta alat analisis yang digunakan masih sangat sederhana sehingga diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam tentang metode pengumpulan, pengolahan/estimasi serta analisis data. Untuk itu, kami mengharapkan agar seluruh pihak yang berkompeten dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya konstruktif, sehingga dalam penyusunan Renja Dinas Pangan pada masa datang akan lebih baik dan sempurna.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palu, Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr.Ir. EVA RANTUNG, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660120 199303 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dibidang pangan dilaksanakan secara holistik dan sistimatis dengan mengacu pada Sistem Ketahanan Pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, guna menjamin ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta kewaspadaan pangan dan gizi. Dalam konteks kekinian, ketahanan pangan akan diarahkan pada pencapaian status masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, dan produktif, secara berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan adanya sinergitas antar seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Keterpaduan dan harmonisasi kegiatan lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan akan mempercepat akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran program ketahanan pangan secara holistik di Sulawesi Tengah.

Urgensi Ketahanan pangan semakin terasa kuat ditengah ancaman krisis pangan dunia yang semakin nyata didepan mata, karena pangan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan ketahanan nasional dan menjadi Hak Asasi Masyarakat untuk mendapatkan pangan yang cukup. Dalam konteks pembangunan ekonomi, ketahanan pangan menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga memerlukan suatu konsep dan grand strategi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan dan masih perlu mendapat perhatian serta dukungan dari Pemerintah dan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kejadian kerawanan pangan diberbagai daerah yang bersifat kronis sepanjang waktu dan transien yang terjadi secara mendadak.

Pembangunan Ketahanan Pangan di Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah tahun 2022-2026 yaitu dimana Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang baru yaitu **“GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”**.

Sedangkan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pangan dan Gizi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ; 273/KPTS/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
 19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan prioritas program dan kegiatan sebagai agenda tahunan dalam mencapai Target untuk memenuhi indicator Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah yaitu ;

Tujuan penyusunannya adalah :

- a. Menjadi pedoman perencanaan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.
- b. Memberikan arah dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan.
- d. Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber-sumber dana pembangunan lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan break down dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). serta berpedoman pada Renstra 2022 - 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Tahun 2022

Program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan sub sistem ketahanan pangan yang menjadi acuan dasar dalam membangun ketahanan pangan, adapun subsistem tersebut meliputi :

- a). Sub sistem ketersediaan pangan, melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- b). Sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan.
- c). Sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk mewujudkan bekerja ketiga subsistem ketahanan pangan tersebut, telah diprogramkan beberapa kegiatan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi selama kurun waktu 1 tahun, antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - a). *Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan*
 - b). *Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur*
 - c). *Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan*
 - d). *Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya*
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - a). *Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan*
 - b). *Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*
 - c). *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*
 - d). *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan*

- e). *Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan*
 - f). *Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*
 - g). *Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*
 - h). *Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal*
 - i). *Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*
 - j). *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)*
 - k). *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun*
3. *Program Penanganan Kerawanan Pangan.*
- a). *Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota*
 - b). *Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi*
 - c). *Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*
4. *Program Pengawasan Keamanan Pangan.*
- a). *Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Provinsi*
 - b). *Sertifikasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota*
 - c). *Registrasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota*
 - d). *Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota*

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan 6 (Enam) sasaran strategis kinerja dan 22 (Dua Puluh Dua) indikator Output, Rincian Capaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat .
Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik
1.	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	23 Ton	23 Ton	100%
5.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perKapita perTahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	1 Laporan	100%

8.	Tersedianya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	100%
9.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10.	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	3 Unit	2 Unit	66.66%
11.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	100%

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik
1.	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	10 unit	-	-
2.	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur	10 unit	8 unit	80%
3.	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	264 Paket	264 Paket	100%
4.	Tersusunnya Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik
1	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik
1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Sertifikasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3	Registrasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

2.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyediaan anggaran yang bersumber dari dana APBD sangat menentukan terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya untuk melaksanakan pelayanan publik. Adapun Realisasi Keuangan untuk Tahun Anggaran 2023 pada satker Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

NO.	U R A I A N	PAGU (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pangan s/d Bulan September Tahun Anggaran 2022				DEVIASI	
			KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	5	6	7	8	10	11
	TOTAL	63.537.003.382	61.836.264.829	97,32	63.537.003.382	100,00	1.700.738.553	2,68
	SEKRETARIAT	12.974.153.135	12.247.535.926	94,40	12.974.153.135	100,00	726.617.209	5,60
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	368.991.400	353.017.500	95,67	368.991.400	100,00	15.973.900	4,33
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	178.592.425	166.701.136	93,34	178.592.425	100,00	11.891.289	6,66
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296.889.375	248.508.835	83,70	296.889.375	100,00	48.380.540	16,30
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.501.747.985	7.016.607.870	93,53	7.501.747.985	100,00	485.140.115	6,47
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.285.328.275	2.226.752.522	97,44	2.285.328.275	100,00	58.575.753	2,56
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	27.000.000	16.000.000	59,26	27.000.000	100,00	11.000.000	40,74

	Perundang-Undangan								
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.431.000	262.963.393	94,79	277.431.000	100,00	14.467.607	5,21	
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.100.989.316	1.064.517.327	96,69	1.100.989.316	100,00	36.471.989	3,31	
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	115.967.100	115.605.578	99,69	115.967.100	100,00	361.522	0,31	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.501.112	213.295.612	93,76	227.501.112	100,00	14.205.500	6,24	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	593.715.147	563.566.153	94,92	593.715.147	100,00	30.148.994	5,08	
TOTAL		12.974.153.135	12.247.535.926	94,40	12.974.153.135	100,00	726.617.209	5,60	

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	99.938.250	98.113.250	98,17	99.938.250	100,00	1.825.000	1,83	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	-	0,00	
3	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	799.999.825	792.138.825	99,02	799.999.825	100,00	7.861.000	0,98	
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan	553.302.875	539.789.752	97,56	553.302.875	100,00	13.513.123	2,44	

	<i>Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>												
5	<i>Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>	81.349.650	75.607.039	92,94	81.349.650	100,00	5.742.611	7,06					
6	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	149.999.825	24.949.750	16,63	149.999.825	100,00	125.050.075	83,37					
7	<i>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</i>	58.540.000	251,105,000	100,00	58.540.000	100,00	-	0,00					
8	<i>Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur</i>	929.715.549	1,935,413,000	98,91	929.715.549	100,00	10.174.199	1,09					
9	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal</i>	59.999.875	283,595,900	93,62	59.999.875	100,00	3.825.000	6,38					
	TOTAL	2.832.845.849	2.664.854.841	94,07	2.832.845.849	100,00	167.991.008	5,93					

BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

1	<i>Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	229.340.295	218.773.615	95,39	229.340.295	100,00	10.566.680	4,61					
---	--	-------------	-------------	-------	-------------	--------	------------	------	--	--	--	--	--

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.336.120.711	1.319.597.084	98,76	1.336.120.711	100,00	16.523.627	1,24
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	259.164.300	255.370.500	98,54	259.164.300	100,00	3.793.800	1,46
TOTAL		1.824.625.306	1.793.741.199	98,31	1.824.625.306	100,00	30.884.107	1,69

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	20.865.831.985	20.339.445.239	97,48	20.865.831.985	100,00	526.386.746	2,52
2	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Pangan	50.000.000	48.290.000	96,58	50.000.000	100,00	1.710.000	3,42
3	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.078.998.100	17.964.802.649	99,37	18.078.998.100	100,00	114.195.451	0,63
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	50.000.000	41.129.654	82,26	50.000.000	100,00	8.870.346	17,74
5	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100.000.000	96.078.982	96,08	100.000.000	100,00	3.921.018	3,92

6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	5.966.382.382	5.880.186.450	98,56	5.966.382.382	100,00	86.195.932	1,44
TOTAL		45.111.212.467	44.369.932.974	98,36	45.111.212.467	100,00	741.279.493	1,64
UPT PSMKP								
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.932.000	161.430.211	97,29	165.932.000	100,00	4.501.789	2,71
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	70.971.625	70.757.200	99,70	70.971.625	100,00	214.425	0,30
PROGRAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Provinsi	158.913.000	150.095.836	94,45	158.913.000	100,00	8.817.164	5,55
2	Sertifikasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota	176.899.000	159.877.042	90,38	176.899.000	100,00	17.021.958	9,62
3	Registrasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota	122.046.000	118.834.600	97,37	122.046.000	100,00	3.211.400	2,63
4	Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota	99.405.000	99.205.000	99,80	99.405.000	100,00	200.000	0,20
TOTAL		794.166.625	760.199.889	95,72	794.166.625	100,00	33.966.736	4,28

2.4 Capaian Renstra Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2022 – 2026 dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis merupakan dokumen yang memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

A. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai. Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Indikator Kinerja berikut target yang ingin dicapai di tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja dari tujuan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN			
	PERESENTASE PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			
1		Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah (%)	100
2		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	89.6
3		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama (%)	10
4		Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kap/hari)	3.040
				69.2
5		Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	21.00
6		Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	81

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Pembangunan daerah Sulawesi Tengah dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pangan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan rencana kerja di lingkungan Dinas pangan. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Dari Indikator kinerja sasaran diatas merupakan tolok ukur pencapaian pelaksanaan *jangka menengah dan jangka panjang*

Capaian Renstra dapat diukur keberhasilannya dari implementasi Rencana Strategis tahun 2023 diatas, Dinas Pangan menetapkan target kinerja yang harus dicapai. Target yang ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja sasaran maupun indikator tingkat kegiatan dapat dijabarkan pada tabel. 3; sebagai berikut :

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari tujuan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR OUTPUT	
		URAIAN	TARGET
1	2	3	4
1. Meningkatnya cadangan pangan masyarakat	1. Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	13 Kab/Kota
2. Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	2. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	41 Unit
3. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	3. Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	13 Unit
4. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	4. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	13 Unit
5. Menurunnya Daerah Rawan Pangan	5. Persentase Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan Beras	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	15 Paket
6. Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	6. Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen

	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,80 Skor
	Presentase Penguatan Cadangan Pangan minimal 370 ton	100 %
	Presentase Ketersediaan Pangan Utama	20 %
	Energi Perkapita/Tahun	3040 kkl/kapita/Thn
	Protein Perkapita/Tahun	70,20 Gram/kapita/tn
	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam stabilisasi Pasokan dan Harga	4 Laporan
	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen
	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit
	Tersedianya Cadangan Pangan Provinsi	370 Ton
	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	260 Ton

		Dokumen Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal yang di Tetapkan oleh pemerintah	1 Laporan
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan
		Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai dengan AKG	3 Dokumen
		Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Dokumen
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan
		Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras)	169,12 %
		Jumlah Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1 Dokumen
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen
		Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen

		Jumlah Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab/Kota	4 Dokumen
		Jumlah Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Dokumen
		Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 Sertifikat
		Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat berbagai capaian dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 2021 – 2026 yang telah diukur dari indikator capaian sasaran.

2.5 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja pelayanan Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD telah terpenuhi sesuai kebutuhan yang ada berdasarkan sasaran dan target Renstra. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2022

URAIAN SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<i>Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	368.991.400	353.017.500	95,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	178.592.425	166.701.136	93,34
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296.889.375	248.508.835	83,70
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	7.501.747.985	7.016.607.870	93,53
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	2.285.328.275	2.226.752.522	97,44
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	27.000.000	16.000.000	59,26
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	277.431.000	262.963.393	94,79
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1.100.989.316	1.064.517.327	96,69
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor</i>	115.967.100	115.605.578	99,69
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	227.501.112	213.295.612	93,76
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau</i>	593.715.147	563.566.153	94,92

<i>Pemerintahan Daerah</i>	<i>Bangunan lainnya</i>			
➤ <i>Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat</i>	<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	99.938.250	98.113.250	98,17
➤ <i>Meningkatnya Ketersediaan Energi & Protein</i>	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	100.000.000	100.000.000	100,00
➤ <i>Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan</i>	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>	553.302.875	539.789.752	97,56
➤ <i>Menurunnya Daerah Rawan Pangan</i>	<i>Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan</i>	799.999.825	792.138.825	99,02
➤ <i>Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama</i>	<i>Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>	81.349.650	75.607.039	92,94
➤ <i>Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama</i>	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	149.999.825	24.949.750	16,63
	<i>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	18.078.998.100	17.964.802.649	99,37
	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota</i>	100.000.000	96.078.982	96,08
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi</i>	50.000.000	41.129.654	82,26

<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>			
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi</i>	5.966.382.382	5.880.186.450	98,56
<i>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</i>	58.540.000	58.540.000	100,00
<i>Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan</i>	50.000.000	48.290.000	96,58
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal</i>	59.999.875	56.174.875	93,62
<i>Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	229.340.295	218.773.615	95,39
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</i>	1.336.120.711	1.319.597.084	98,76
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>	259.164.300	255.370.500	98,54
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	165.932.000	161.430.211	97,29
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan</i>	70.971.625	70.757.200	99,70

<i>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>			
<i>Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Provinsi</i>	158.913.000	150.095.836	94,45
<i>Sertifikasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota</i>	176.899.000	159.877.042	90,38
<i>Registrasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota</i>	122.046.000	118.834.600	97,37
<i>Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota</i>	99.405.000	99.205.000	99,80
SUB TOTAL	63.537.003.382	61.836.264.829	97,32

2.6 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Ketahanan Pangan merupakan suatu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk Provinsi Sulawesi Tengah program ketahanan pangan telah dimasukkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang merupakan kelanjutan pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan kedepan tidak terlepas dari kondisi capaian pembangunan ketahanan pangan yang telah dihasilkan sebelumnya, namun keberhasilan-keberhasilan yang dicapai masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dengan pencapaian akhir bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan-permasalahan ketahanan pangan yang timbul selama ini bersumber dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal diantaranya kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak termanfaatkan dan ancaman yang tidak terantisipasi.

Perencanaan kedepan, permasalahan pemantapan ketahanan pangan dapat terpecahkan, sehingga tiap-tiap permasalahan perlu diidentifikasi dan diverifikasi sebagai faktor-faktor pemicu dan penentu keberhasilan pembangunan pemantapan ketahanan pangan. Faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan pemantapan ketahanan pangan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor lainnya yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam pemecahan permasalahan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pemantapan ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan mendasar yang perlu terus diupayakan solusi pemecahannya masalahnya. Adapun permasalahan yang sifatnya internal maupun eksternal dan masuk dalam kategori persoalan klasik adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat masih sangat tergantung pada salah satu komoditas pangan pokok yaitu beras, sehingga program penurunan konsumsi beras sangat sulit tercapai
2. Masih rendahnya akses pangan masyarakat yang diakibatkan karena rendahnya daya beli dan pendapatan.
3. Masih terdapat penduduk yang terindikasi penduduk rawan pangan dan rumah tangga miskin, meskipun telah menunjukkan trend yang menurun.
4. Pengembangan kelembagaan lumbung pangan belum berkelanjutan.
5. Dewan Ketahanan Pangan belum maksimal melakukan kegiatannya terutama dalam hal advokasi pangan.
6. Belum maksimalnya sistem penyediaan pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masih terdapat sekitar 70 % pangan segar yang beredar dimasyarakat mengandung residu pestisida.
7. Produsen (petani dan pengusaha) pangan segar belum menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dalam system usaha taninya.
8. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan segar yang aman dikonsumsi.

2.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud implementasi terhadap rancangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui sejauh mana substansi RKPD telah dimasukkan dalam Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Review Rancangan Rencana Kerja 2023

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PANGAN									
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	85	11.890.267.84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	85	11.890.267.84
			Meningkanya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	81	4			Meningkanya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	81	44
			Jumlah Indeks Reformasi Birokrasi	66,5				Jumlah Indeks Reformasi Birokrasi	66,5	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	648.362.275	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	648.362.275
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	268.027.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	268.027.750

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.050.625	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.050.625
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	8.700.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	8.700.300
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.670.625	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.670.625
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	14.990.625	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	14.990.625
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	113.322.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	113.322.000

	Perangkat Daerah	Prov/Kab/Kota	Administrasi dalam peningkatan SDM pegawai	Jumlah Orang	23.620.000	6 Orang	Perangkat Daerah	Prov/Kab/Kota	peningkatan SDM pegawai	n	23.620.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov/Kab/Kota	Jumlah ASN Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	23.620.000	6 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov/Kab/Kota	Jumlah ASN Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	23.620.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	50.500.000	65 Orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	50.500.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Rapat Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	256.719.754	2 Laporan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Rapat Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	256.719.754
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	233.027.600	1 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	233.027.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov/Kab/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.489.304	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov/Kab/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.489.304
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/Kab/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.202.850	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/Kab/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.202.850

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov/K ab/ Kota	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Unit	145.412.266	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov/ Kab/ Kota	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Unit	145.412.266
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov/K ab/ Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10.227.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov/ Kab/ Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10.227.800
	Pengadaan Meubel	Prov/K ab/ Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	80.262.000	Pengadaan Meubel	Prov/ Kab/ Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	80.262.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov/K ab/ Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	54.922.466	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov/ Kab/ Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	54.922.466
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov/K ab/ Kota	Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	346.578.537	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov/ Kab/ Kota	Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	346.578.537
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/K ab/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	123.683.889	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	123.683.889

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.400.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	189.494.648	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	189.494.648
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov/Kab/Kota	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51 Unit	707.053.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov/Kab/Kota	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51 Unit	707.053.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov/Kab/Kota	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	77.348.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov/Kab/Kota	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	77.348.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	284.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	284.900.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov/Kab/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	344.805.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov/Kab/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	344.805.000

8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	13 Kab/Kota	5.493.754.662	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	13 Kab/Kota	5.493.754.662	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	13 Kab/Kota	5.493.754.662
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provins	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	41 Unit	5.493.754.662	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provins	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	41 Unit	5.493.754.662	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	41 Unit	5.493.754.662
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	13 Unit	250.000.310	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	13 Unit	250.000.310	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	13 Unit	250.000.310
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	13 Unit	1.230.037.000	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	13 Unit	1.230.037.000	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	13 Unit	1.230.037.000
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	15 Unit	3.813.717.352	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	15 Unit	3.813.717.352	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	15 Unit	3.813.717.352
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	200.000.000	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	200.000.000

	Pangan		89,80 Skor		Pangan		89,80 Skor	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Presentase Penguatan Cadangan Pangan minimal 370 ton Presentase Ketersediaan Pangan Utama Energi Perkapita/Tahun Protein Perkapita/Tahun	89,80 Skor 100 % 10 % 3040 kkl/kap/h 69,2 kkl/kap/h	6.989.673.103	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Presentase Penguatan Cadangan Pangan minimal 370 ton Presentase Ketersediaan Pangan Utama Energi Perkapita/Tahun Protein Perkapita/Tahun	89,80 Skor 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	16,605,844,422
9	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam stabilisasi Pasokan dan Harga	4 Laporan	1.544.999.750	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam stabilisasi Pasokan dan Harga	4 Laporan	1.544.999.750
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	100.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	100.000.000

Makanan													
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prov/K ab/Kota	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1.070.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prov/Kab/Kota	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1.070.000.000				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Prov/K ab/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Prov/Kab/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	100.000.000				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Prov/K ab/Kota	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Laporan	74.999.750	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Prov/Kab/Kota	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Laporan	74.999.750				
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Prov/K ab/Kota	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit	200.000.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Prov/Kab/Kota	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		200.000.000				
10 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi	370 Ton	3.135.148.200	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi	370 Ton	3.135.148.200				
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Prov/K ab/Kota	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	148.984.250	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Prov/Kab/Kota	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	148.984.250				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Prov/K ab/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	385.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Prov/Kab/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	385.000.000				

	Pemeliharaan Cadangan Pemerintah Provinsi	Prov/Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	260 Ton	2.601.163.950	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Prov/Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	260 Ton	2.601.163.950
11	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Prov/Kab/Kota	Jumlah Harga Minimum Daerah Pangan Lokal yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat	1 Laporan	100.000.100	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Prov/Kab/Kota	Jumlah Harga Minimum Daerah Pangan Lokal yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat	1 Laporan	100.000.100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Prov/Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	100.000.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Prov/Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	100.000.100
12	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Prov/Kab/Kota	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai dengan AKG	3 Dokumen	2.209.525.053	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Prov/Kab/Kota	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai dengan AKG	3 Dokumen	2.209.525.053
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prov/Kab/Kota	Jumlah Promosi penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	540.000.000	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prov/Kab/Kota	Jumlah Promosi penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	540.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Prov/Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Prov/Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Dokumen	200.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Prov/Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	109.998.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Prov/Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	109.998.500
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prov/Kab/Kota	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	169 %	1.314.943.950	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras)	Prov/Kab/Kota	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras)	169 %	1.314.943.950
13		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	1 Dokumen	99.943.950	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Jumlah Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	99.943.950
	Prov/Kab/Kota	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan	1 Dokumen	99.943.950	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan	Prov/Kab/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	99.943.950

Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dimutakhirkan		Provinsi dan Kabupaten/Kota				
14	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	1.215.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	1.215.000.000
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	940.000.150	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	940.000.150
	Jumlah Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	274.999.850	Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	274.999.850
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Anggaran	352.908.314	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			352.908.314
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peralatan dan	266.248.314	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Paket	266.248.314

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov/Kab/Kota	Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	86.660.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov/Kab/Kota	Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	86.660.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	86.660.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	86.660.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Meningkatnya Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	81 %	674.999.793	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Meningkatnya Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	81 %	674.999.793
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov/Kab/Kota	Meningkatnya Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		674.999.793	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov/Kab/Kota	Meningkatnya Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		674.999.793
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Prov/Kab/Kota	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar dan Fasilitas Laboratorium	13 Kab/Kota 1 Unit	118.030.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Prov/Kab/Kota	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar dan Fasilitas Laboratorium	13 Kab/Kota 1 Unit	118.030.000

	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov/Kab/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	340000 Label	188.911.593	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov/Kab/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota	340000 Label	188.911.593
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov/Kab/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota	65 Kelompok	186.088.200	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov/Kab/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/ Kota	65 Kelompok	186.088.200
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kelompok	181.970.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota	10 Kelompok	181.970.000

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah telah menetapkan kebijakan secara nasional yang harus menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai Isu strategis telah diangkat sebagai referensi dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunan Nasional yang juga merupakan pengayaan terhadap kondisi lingkungan eksternal yang terkait langsung dengan pencapaian pembangunan ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun kedepan. Masalah dan tantangan yang masih dihadapi dimasa datang diantisipasi dengan melakukan identifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program, serta RPJMN dan RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Isu-isu yang dihasilkan dari identifikasi telah dirumuskan dan dipilih secara nasional, regional, maupun daerah antara lain :

A. ISU NASIONAL

Isu nasional saat ini terkait ketahanan pangan

KETAHANAN PANGAN YANG MANDIRI DAN BERDAULAT

Undang-undang No 18 Tahun 2012 secara tegas mengamanatkan perlunya Indonesia membangun ketahanan pangan mandiri dan berdaulat. Ketahanan Pangan (food security) adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan sesuai dengan UU No 8/2012 yaitu: (a) kecukupan ketersediaan pangan; (b) stabilitas ketersediaan pangan, (c) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, dan (d) kualitas/ keamanan pangan.

Indikator keberhasilan membangun ketahanan pangan dapat diukur dari kombinasi keempat komponen tersebut.

KEMANDIRIAN PANGAN

Kemandirian Pangan (food resilience), adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat (UU 18 Tahun 2012).

Kemandirian mengacu kepada peningkatan kemampuan negara dan bangsa untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang beragam yang bersumber dari dalam negeri melalui pendayagunaan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal secara optimal. Kemandirian dicirikan oleh tiga hal pokok yaitu: (a) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal, (b) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (c) pemanfaatan pangan.

KEDAULATAN PANGAN

Kedaulatan Pangan (food severegnty), adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Istilah kedaulatan pangan lebih kepada penegasan bahwa sebagai negara merdeka dan berdaulat maka Indonesia mempunyai kebebasan secara berdaulat kedaulatan untuk menentukan strategi, kebijakan dan program serta sistem pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tidak dapat diatur, didikte atau diintervensi oleh negara lain.

STRATEGI PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN YANG MANDIRI DAN BERDAULAT

Atas dasar permasalahan, tantangan dan keinginan untuk pencapaian ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat, dapat dirumuskan dalam enam program utama, yaitu: (1) peningkatan penyediaan pangan melalui pemanfaatan sumber daya domestik, (2) penguatan cadangan pangan,(3) pengelolaan perdagangan pangan bagi kepentingan nasional, (4) penanganan kerawanan pangan kronis dan transien, (5) pengembangan diversifikasi konsumsi pangan, dan (6) perbaikan sistem mutu dan gizi pangan

B. ISU REGIONAL SULAWESI

Pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu penghasil pangan utama untuk menopang kebutuhan pangan secara nasional dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, mengembangkan bio-energi serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional.

Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa

kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi

konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol persedaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA)

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 OPD Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah mendorong terwujudnya kedaulatan, kemandirian pangan wilayah secara berkelanjutan yang diimplementasikan pada beberapa kegiatan utama yang terdiri atas :

- 1) Mewujudkan Kelembagaan yang handal dalam Pemantapan Ketahanan Pangan, *melalui* ;

- a). *Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan*
 - b). *Ketersediaan Informasi distribusi /Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah.*
 - c). *Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.*
 - d). *Pengurangan konsumsi Beras melalui Penganekaragaman konsumsi Pangan.*
 - e). *Penanganan daerah rawan pangan*
- 2) Menyiapkan tenaga yang kompeten, profesional dalam mengelola ketahanan pangan.
 - 3) Menciptakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien.
 - 4) Mewujudkan dukungan dana dalam penyelenggaraan urusan di bidang pangan.
 - 5) Penyelenggaraan kegiatan koordinasi antar pusat dan daerah dapat terintegrasi dengan baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri atas program prioritas nasional dan program prioritas daerah. Adapun program/kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**
 - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
 - c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - d. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- f. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- g. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- h. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
- j. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- k. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- l. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

3. Program Penanganan Rawan Pangan

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi

- c. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- e. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Alokasi Anggaran pada OPD Dinas Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dipergunakan untuk membiayai program-program Dinas Pangan serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Dinas Pangan.

BAB IV. PENUTUP

Dengan adanya regulasi dimaksud maka setiap daerah harus mampu membangun sistem ketahanan pangan yang terintegrasi dengan program pembangunan lainnya ditingkat daerah. Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan wilayah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, akan sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah daerah baik melalui regulasi daerah maupun alokasi anggaran kegiatan yang proporsional. mengingat peran dan fungsi Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah semakin strategis ditengah meningkatnya persoalan pemenuhan pangan secara cukup, aman dan terjangkau. Dukungan anggaran secara proporsional untuk urusan ketahanan pangan akan mendorong tercapainya pelayanan dasar masyarakat serta mengurangi indikasi meningkatnya penduduk rawan pangan

Konsistensi dukungan anggaran APBD terhadap program dan kegiatan ketahanan pangan sebagaimana yang ada dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 akan sangat menentukan capaian indicator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dimana secara jangka panjang akan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing